

Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar Pada Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

Muhammad Natsir Mallawi

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Alfiana Akbar

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yappi Makassar

Korespondensi penulis: natsirmallawi01@gmail.com

Abstract: *This research aims to find out how the coastal community empowerment program is implemented in Takalar Regency at the South Sulawesi provincial fisheries service. What factors support and inhibit the implementation of the coastal community empowerment program in Takalar Regency at the South Sulawesi provincial fisheries service. The type of research used is a qualitative descriptive approach. The focus of this research is increasing capacity, providing access to technology and information, capital, infrastructure, market guarantees, productive economic assets. The number of informants was 10 employees of the South Sulawesi provincial fisheries service. The data collection techniques used were observation, interviews, documentation, liberal research. The data analysis technique used is data reduction, which means summarizing important things. The data presentation carried out in this research is the data obtained through research results are presented and presented in text or written form and described in qualitative form. The results of this research show that the programs provided by the fisheries service to coastal communities in Takalar Regency are appropriate and there has been improvement, namely the existence of activity programs from the government and the South Sulawesi provincial fisheries service so that with these programs and activities coastal communities are able to empower themselves.*

Keywords: *Implementation, program, empowerment, coastal communities.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan, Faktor apa saja pendukung dan penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah peningkatan kapasitas, pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, aset ekonomi produktif. Jumlah informan 10 orang pegawai dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, library reserce. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data yang artinya merangkum hal-hal penting, Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui hasil penelitian disajikan dan dipaparkan dalam bentuk teks atau tulisan dan dideskriptifkan dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program yang diberikan oleh dinas perikanan kepada masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar sudah tepat dan sudah ada peningkatan yaitu adanya program kegiatan dari pemerintah dan dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan sehingga dengan adanya program dan kegiatan tersebut masyarakat pesisir mampu memberdayakan dirinya.

Kata kunci: Implementasi, program, pemberdayaan, masyarakat pesisir.

PENDAHULUAN

Perubahan social ekonomi didesa pesisir telah memperjelas garis stratifikasi social masyarakatnya, nelayan merupakan lapisan yang paling banyak jumlahnya dimana mereka hidup dalam taraf kemiskinan dan tekanan-tekanan social ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kompleks yang saling terkait. adapun salah satu strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yaitu upaya yang dapat dilakukan dalam mendukung program yang melalui pembebrdayaan masyarakat pesisir dalam memelihara dan melindungi sumberdaya perikanan

Received Agustus 30, 2023; Revised September 30, 2023; Accepted Oktober 30, 2023

* Muhammad Natsir Mallawi, natsirmallawi01@gmail.com

dan dengan membentuk sistem pengawasan berbasis masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana.

Undang-Undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan bahwa negara kesatuan republic Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki sumberdaya alam yang melimpah yang merupakan rahmat dan karunia tuhan yang maha esa bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia yang harus dikelola secara berkelanjutan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republic Indonesia tahun 1945 bahwa wilayah laut sebagai bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki pesisir dan nilai strategis dari berbagai aspek kehidupan mencakup politik, ekonomi, social budaya, pertanian, dan keamanan merupakan model dasar pembangunan nasional, peneglolaan sumberdaya kelautan dilakukan melalui sebuah kerangka hukum untuk memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara.

Meskipun pembangunan masyarakat selalu menjadi focus perhatian pemerintah sejak lama, namun asas dan strategi pembangunan masyarakat pesisir seringkali mengalami perubahan. Paradigma pembangunan mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan.kapitalisasi sector perikanan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta integrasi dengan pemasaran yang lebih lebih luas untuk melaksanakan melalui program. Pembangunan pedesaan didasarkan pada teori modernisasi dan dilakukan melalui penerapan satuan produksi yang padat karya dengan harapan untuk mendorong pendapatan melalui pemanfaatan teknologi.

Sekarang ini daerah pesisir mulai menjadi focus utama akibat terjadinya ketertinggalan pada masyarakat pesisir, direktorat pemberdayaan masyarakat pesisir dalam kiprahnya berusaha meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat pesisir,hal ini ditempuh dengan memberikan penguatan baik ang bersifat ekonomi kelembagaan maupun yang bersifat social budaya yang muaranya kepada peningkatan kesejahteraan, Kesejahteraan masyarakat akan cepat terwujud jika didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarkat. setiap program pemberdayaan masyarakat yang disusun (disiapkan) harus senang tiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. perencanaan dalam menyusun program-program pemberdayaan masyarakat pesisir dan pembangunan atau industry-industri yang membangun kegiatan usaha disuatu daerah termasuk dipedesaan harus melakukan analisis kebutuhan masyarakat pesisir. Dalam melakukan analisis kebutuhan (*Needs Anlysis*) harus benar-benar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir, dan bukan sekedar membuat daftar keinginan (*List Of Wants*) yang bersifat

sesaat. analisis kebutuhan harus dilakukan dengan benar agar dapat menggalikan kebutuhan-kebutuhan sesungguhnya yang dibutuhkan oleh orang banyak.

Provinsi Sulawesi selatan memiliki panjang garis pantai 1.937 km yang terdiri dari 24 kabupaten /kota yang memiliki wilayah pesisir sepanjang 1.979.97 km garis pantai, dengan jumlah penduduk wilayah pesisir 286.906 jiwa, jika dibandingkan dengan pendapatan wilayah pesisir dengan tingkat pendapatan wilayah daratan, wilayah pesisir masih memiliki pendapatan rendah, keterbatasan Pendidikan, tingkat pengetahuan dan keterampilan masih sangat rendah dibandingkan wilayah daratan.

Kabupaten takalar memiliki Panjang garis pantai 74 km dan jumlah wilayah pesisir 240 dan jumlah penduduk wilayah pesisir 286.906 jiwa yang memiliki sumber daya laut yang potensialnya diberdayakan namun tingkat pengolahannya masih sangat terbatas karena tingkat masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar masih rendah dalam hal kemampuan pengetahuan dan keterampilan, modal usaha, sarana prasarana dan lain-lain sehingga perlu untuk diberdayakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang " Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan ". hal ini merujuk pada konsep pemberdayaan masyarakat pesisir bahwasanya diperlukannya pemberdayaan masyarakat disektor perikanan, dengan harapannya agar pemberdayaan masyarakat dipedesaan mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuannya misalnya, punya keberanian mengambil resiko dan keputusan dalam menghadapi suatu masalah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya tentang bagaimana implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada Dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan.

Fokus masalah penelitian ini merupakan penjelasan dari kerangka fikir penelitian yaitu untuk mengetahui implementasi program pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, peraturan menteri kelautan dan perikanan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang meliputi: Peningkatan kapasitas, Pemberian akses teknologi dan informasi, permodalan, infrastruktur, jaminan pasar, dan asset ekonomi produktif. Penelitian ini juga membahas faktor penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi selatan yaitu

: 1.) Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir, 2.) terbatasnya permodalan usaha, 3.) Terbatasnya Sarana Prasarana Penunjang Infrastruktur, 4.) Keterbatasan uasah masih kurang berperan.dan faktor pendukung Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Takalar Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :1.) Potensi Sumber Daya Alam Masyarkat pesisir, 2.) Jumlah Masyarakat, 3.) Kebijakan pemerintah.

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan, Populasi dan sampel ialah pegawai dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi selatan yang bekerja disektor perikanan laut yang berjumlah sebanyak 195 Orang namun dengan pertimbangannya yang menjadi sasaran penelitian sesungguhnya adalah 9 orang pegawai dinas perikanan dan 1 orang masyarakat pesisir dan dipilih secara sengaja (purposive) 10 orang.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan proses mengorganisasikan atau mengurutkan data. Semua data yang dikumpulkan dari penelitian berupa jawaban dari informan mendeskripsikan dalam bentuk narasi dari hasil pedoman wawancara. Begitu pula dengan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan dokumen yang berhubungan dengan tujuan penelitian yang ditemukan dilokasi penelitian. Semua data yang diperoleh ini selanjutnya dipaparkan brdasarkan uraian informasi yang diperoleh dari informan yang mengetahui persis pokok persoalan yang akan diteliti.

Proses analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data : Mereduksi data berarti merangkum hal-hal penting yang memfokuskan pada hal-hal pokok. Hasil penelitian yang diperoleh melalui pedoman observasi, wawancara dokumentasi dan dirangkum secara terpisah , sesuai dengan data yang diperlukan.
2. Penyajian Data : Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.data yang diperoleh melalui hasil penelitian disajikan dan dipaparkan dalam bentuk teks dan dideskripsikan dalam bentuk kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan

Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan merupakan strategi membangun masyarakat pesisir

setempat dengan mewujudkan program dan potensi dasar masyarakat pesisir agar bisa meningkatkan atau menghasilkan nilai bagi masyarakat pesisir. Program pemberdayaan yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kabupaten takalar, memberikan bantuan sarana dan prasarana ke masyarakat pesisir, dan pembangunan infrastruktur.

Adapun indikator Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ada lah sebagai berikut :

a. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas merupakan indicator yang menentukan sukses atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan khususnya implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa: “Kebijakan peningkatan kapasitas itu seperti peningkatan armada, alat tangkap dan sarana prasarana, peningkatan pembangunan infrastruktur yang diberikan kemasyarakat pesisir,akan tetapi kebijakan dari pemerintah masih mempunyai keterbatasan untuk membangun infrastruktur”.(Wawancara,20 Juli 2023).

Sedangkan wawancara Sekertaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa : “Strategi peningkatan kapasitas yang dilakukan dimasyarakat pesisir kabupaten takalar itu melakukan pembangunan yang belum ada, melakukan sosialisasi dengan penduduk /masyarakat pesisir untuk terus mengembangkan Sumber Daya Alam pesisir yang ada”. (Wawancara, 22 July 2023).

Sedangkan menurut Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: “Program Peningktannya itu Pemberian bantuan sarana dan prasarana alat bantu penangkapan dan bantuan fasilitas budidaya rumput laut dan diberikan bibit untuk masyarakat pesisir”. (Wawancara, 24 July 2023).

Sedangkan menurut Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa: “Program-Program pemberdayaan Masyarakat pesisir kabupaten takalar itu ada pemberian pelatihan,melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman,bentuk pelatihan kelompok usaha,memberikan penerapan tentang teknologi”.(Wawancara, 26 July 2023).

Sedangkan menurut Sekertaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa : “Bentuk kegiatannya itu diberikan fasilitas akses perbankan dan diberikan kartu kusuka untuk Masyarakat pesisir dan berikan modal usaha berupa alat”.(Wawancara, 28 July2023).

b. Pemberian akses teknologi dan informasi

Pemberian akses teknologi dan informasi merupakan salah satu peran utama teknologi digital dalam masyarakat pesisir dalam meningkatkan produktifitas dan efisisen,penerapan teknologi didigital.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: "Adapun program yang diberikan kenelayan yaitu teknologi digital, alat komunikasi dan PMS/ peralatan sistem tenaga listrik,alat untuk mengakses informasi tentang cuaca,Geografis Informasi Sistem (GIS), GPS untuk mengidentifikasi penangkapan ikan Dengan adanya program ini masyarakat pesisir dapat meningkatkan penghasilannya".(Wawancara, 31 September 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: "Kegiatannya itu ada Namanya pelatihan mata pencarian terkait Bimbingan Teknis (BIMTEK) , Mata Pencaharian Alternatif (MPA).dalam mendukung usaha garam rakyat dan pertambak garam rakyat di takalar dan telah dilibatkan beberapa kelompok usaha garam rakyat dan diberikan mesin pompa dan geomembran untuk kelompok usaha garam sehingga kegiatannya berjalan dengan baik".(Wawancara,02 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa : "Kegiatannya yaitu melakukan program pelatihan penanganan ikan diatas kapal terkait mulai dari awal ditangkap agar ikan tetapsegar, nelayan pun menangani hasil ikan yang ditangkap dan diberikan es agar ikan tersebut tetap segar dan alat informasi yang diberikan ke Masyarakat pesisir yaitu alat komunikasi yang diberikan kenelayan yaitu PMS".(Wawancara, 04 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dan Pengawasan menyatakan bahwa : "Teknologi dan informasinya itu diberikan alat bantu untuk membantu mereka bekerja di laut untuk mencari ikan agar mereka bisa meningkatkan penghasilan dan pendapatannya". (Wawancara, 07 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: "kegiatan yang diberikan kemasyarakat pesisir yaitu pemberian mesin iodisasi garam pada kelompok garam di Kabupaten Takalar dan telah dilibatkan beberapa kelompok usaha garam dalam bimtek yang dilaksanakan mulai Angkatan 1-4 pada tahun 2022". (Wawancara, 09 Agustus 2023).

c. Permodalan

Pengembangan aspek ekonomi sangat penting untuk dikembangkan dilapangan kerja dan berusaha serta dapat meningkatkan pendapatan. Keberhasilan dalam peningkatan pendapatan akan dipengaruhi oleh kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan permodalan yang dapat disediakan serta kondisi pasar yang mendukung keberhasilan kegiatan itu sendiri akan dipengaruhi oleh kondisi sumber daya laut dan pesisir yang ada. Dan serta kualitas sumber daya manusia yang akan mengelolanya.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan menyatakan bahwa : "Dengan adanya program ini ,kami memberikan fasilitas kepada masyarakat pesisir berupa bantuan modal bagi kelompok-kelompok yang ada,kami juga memberikan bantuan berupa tali, perahu, alat tangkap, mesin dan lainnya kepada masyarakat pesisir/nelayan dengan bantuan tersebut sehingga masyarakat pesisir dapat memberdayakan dirinya". (Wawancara, 11 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara dari Staf Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: "Bentuk permodalan yang kita berikan ke masyarakat pesisir itu berupa fasilitas akses usaha nelayan,fasilitas kredit usaha perikanan tangkap, sehingga nelayan mudah mengakses usaha kredit perikanan tangkap". (Wawancara, 25 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa : "melalui usaha rakyat bantuan permodalan untuk memperkuat usaha kita memberikan sarana itu sumber mata pencahariannya lainnya seperti usaha perbengkelan".(Wawancara,14 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara dari Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: ".Bentuk permodalan yang kita berikan kemasyarakat pesisir itu berupa alat pengkapan ikan, alat infrastruktur penangkapan ikan".(Wawancara, 16 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara dari Perikanan Budidaya Dan Daya Saing Produk menyatakan bahwa: "Alat-alat budidaya yang diberikan kemasyarakat pesisir itu ada saluran irigasi tambal, mobil retrigulasi, col box, dan pengembangan budidaya perikanan itu dengan membangun infrastruktur pembangunan sarana pemasaran".(Wawancara,18 Agustus 2023).

d. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Hubungan antara dua hal tersebut merupakan hubungan yang saling timbal balik karena infrastruktur yang dibangun dapat menimbulkan perluasan ekonomi. Perluasan ekonomi yaitu munculnya kebutuhan-kebutuhan infrastruktur yang bertujuan untuk memperlancar pergerakan manusia dan barang.infrastruktur pada sistem fisik dapat

menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan dan fasilitas public lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pesisir dalam ruang lingkup social dan ekonomi masyarakat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: “Yang diberikan kemasyarakat pesisir pembangunan fasilitas darat dan laut yaitu dermaga, kapal trastel, brikoter, dan pemecah gelombang adapun fasilitas yang diberikan didarat yaitu kantor, Tempat Pemasaran Ikan (TPI), pabrik es, alat yudisasi garam, gudang garam”.(Wawancara, 21 Agustus 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: “Infrastruktur yang diberikan kemasyarakat pesisir itu berupa pembangunan pelabuhan beba sebagai tempat bongkar muat produksi hasil ikan dibeba, pembangunan TPI beba, pabrik es, kapal penangkapan ikan, kantor, pos jaga dan pagar kompleks serta brenasi”.(01 September 2023).

Sedangkan wawancara dari Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan menyatakan bahwa : “Bentuk infrastruktur yang diberikan kemasyarakat pesisir itu berupa pembangunan dermaga, pembangunan TPI, pabrik es, kantor, gudang, pembangunan breakwater”.(Wawancara 23 Agustus 2023).

f. Jaminan Pasar

Pasar merupakan faktor penarik dan bisa menjadi salah satu faktor utama apa bila tidak berkembang. maka dari itu membuka jaminan pasar adalah cara untuk mengembangkan suatu usaha bila tidak ada pasar maka usaha akan terhambat perkembangannya. untuk mengembangkan pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat dengan perusahaan yang besar ada juga eksportir komoditas perikanan. Untuk itu maka kontrak penjualan produk antara masyarakat nelayan dengan perusahaan ini dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dan Pengawasan menyatakan bahwa: “Jaminan pasar yang telah diberikan kemasyarakat pesisir itu tersedianya harga dan produksi ikan dan produksi udang yang didaratkan dipasar”.(Wawancara, 25 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: “Kita telah memberikan fasilitas kemasyarakat pesisir berupa akses perbankan, dana kur, dan kita juga telah memberikan kartu kusuka untuk masyarakat pesisir”.(Wawancara, 28 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara Staf Bagian Program menyatakan bahwa : “Jaminan pasar nya itu berupa pengembangan pasar lokal, produk lokal, promosi produk pesisir, penyediaan akses pasar, menyediakan bantuan proses perizinan”.

g. Aset Ekonomi Produktif

Aset Ekonomi Produktif adalah suatu aset baik kekayaan maupun harta yang digunakan untuk menunjang operasional kegiatan. Aset juga juga dapat memberikan keuntungan jangka Panjang. Apa saja aset ekonomi produktif yang diberikan masyarakat pesisir.

Berdasarkan wawancara dari Kepala Bidang Budidaya Saing Dan Produk Kelautan Dan Perikanan Menyatakan Bahwa : “bentuk Asset yang diberikan kemasyarakat pesisir itu berupa rumput laut yang tidak terbatas dan diberikan kepasar dan perlu untuk diekspor”.(Wawancara,30 Agustus 2023).

Sedangkan hasil wawancara Masyarakat Pesisir menyatakan bahwa: “Asset yang telah diberikan kekami itu kita telah diberikan rumput laut tidak terbatas dan diberikan kepasar untuk diekspor, Dan 2019 telah dihibahkan kapasitas 1000 ton gudang garam kekabupaten takalar”.(Wawancara,01 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara Staf Bagian Program menyatakan bahwa : “Aset yang diberikan itu berupa peralatan penangkapan ikan, sarana penyimpanan hasil perikanan dan alat teknologi “.

C. Faktor penghambat dan pendukung implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan.

a. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara Sekertaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa hambatan yang ditemukan dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut : “Rendahnya tingkat Pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat pesisir khususnya kabupaten takalar dengan jumlah masyarakat yang cukup banyak yang mendiami wilayah pesisir namun dengan tingkat pengetahuan dan keterampilannya masih rendah yaitu Terbatasnya ekonomi masyarakat pesisir sehingga mereka tidak dapat melanjutkan Pendidikan mereka, dan ada juga masyarakat yang belum mengembangkan kemampaun yang mereka miliki dan masih ada keraguan untuk mengembangkannya sehingga itu yang akanmenjadi penghambat pengetahuan dan keterampilannya”.(Wawancara,02 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara dari Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: “Terbatasnya Permodalan Usaha Masyarakat pesisir yang ingin membuka usaha namun masih memiliki keterbatasan dengan

ekonomi mereka sehingga banyak masyarakat pesisir yang masih tertinggal”.(Wawancara,05 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara Kepala Bidang Perikanan Tangkap menyatakan bahwa: “Terbatasnya Sarana dan prasarana penunjang infrastruktur salah satu yang menghambat perekonomian masyarakat pesisir kabupaten takalar saat ini adalah pembangunan infrastruktur dan masih kurangnya pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakat pesisir dan pemerintah juga masih mempunyai keterbatasan untuk membangun”.(Wawancara, 07 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: “Keterbatasan usaha masih kurang berperan masyarakat pesisir kabupaten takalar yang mempunyai usaha namun masih kurang dukungan dan sosialisasi dari pemerintah dan dinas perikanan provinsi Sulawesi selatan sehingga saat ini yang menjadi penghambat masyarakat pesisir kabupaten takalar”.(Wawancara,09 September 2023).

b. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa faktor pendukung implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai berikut: “Tersedianya sumber daya alam masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar dimana kabupaten takalar memiliki potensi pesisir sepanjang 74 km, potensi budidaya rumput laut, budidaya ikan, udang dan potensi perikanan tangka”.(Wawancara,11 September 2023).

Sedangkan hasil wawancara Kepala Bidang Pengelolaan Dan Penataan Ruang Laut Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa: “Bila dilihat dari jumlah masyarakat pesisir yang mendiami wilayah pesisir cukup banyak ada yang bekerja sebagai nelayan,pembudi daya ikan, pengelolaan dan pemasaran ikan”.(Wawancara, 14 September 2023)

Sedangkan hasil wawancara Sekertaris Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa: “Kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi selatan di kabupaten takalar lebih diarahkan pada program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir seperti pemberian sarana dan prasarana, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir”.(Wawancara, 17 September 2023).

Pembahasan

Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar pada dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan yaitu:

a. Peningkatan Kapasitas

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini sudah dilaksanakan dimasyarakat pesisir kabupaten takalar, sudah tepat, karena dengan adanya program-program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir Kabupaten Takalar.

Kebijakan peningkatan kapasitas itu dilakukan melalui kegiatan dan pelatihan, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan pembangunan infrastruktur dan melakukan sosialisasi ke masyarakat pesisir untuk terus mengembangkan sumber daya alam yang ada .

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud pasal 11 huruf a yaitu dilakukan dengan memfasilitasi penyelenggaraan, pendidikan pelatihan dan penyuluhan. Sedangkan menurut “Agustino” (2014:124) mengatakan bahwa implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu suatu proses yang dilakukan dengan suatu program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir baik secara kelompok maupun individu guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

b. Pemberian akses teknologi dan informasi

Adapun pemberian akses teknologi dan informasi yang diberikan ke masyarakat pesisir itu berupa teknologi digital, alat komunikasi dan PMS, alat sistem tenaga listrik alat untuk mengakses informasi tentang cuaca, alat geografis informasi sistem, GPS alat untuk mengidentifikasi penangkapan ikan. Hasil penelitian tersebut Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b dilakukan dengan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi ramah lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana teknologi, pengembangan jejaring usaha dan sistem komunikasi.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pemberian akses teknologi dan informasi terhadap masyarakat pesisir sudah optimalnya atau sudah tersedianya informasi dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi yang diberikan ke masyarakat pesisir agar mereka mampu meningkatkan penghasilannya.

c. permodalan

Pada implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini sudah sesuai dengan proses yang dilakukan melalui pemberian bantuan permodalan berupa bantuan modal bagi kelompok-kelompok yang ada, fasilitas akses usaha nelayan, fasilitas kredit usaha perikanan tangkap, bantuan berupa tali, perahu, alat tangkap, mesin.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori menurut “Gaffar”,(2009:295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. biasanya dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten takalar telah membantu mewujudkan ekonomi masyarakat pesisir dengan adanya permodalan dari dinas kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan sehingga masyarakat pesisir mampu memberdayakan dirinya sendiri.

d. Infrastruktur

Pada implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir ini sudah baik, dimana ini bisa dilihat dari pihak Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sudah melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur secara terprogram setiap tahunnya. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan dimasyarakat pesisir itu pembangunan dermaga, pembangunan Tempat Pemasaran Ikan (TPI), pembangunan pelabuhan, pembangunan breakwater, gudang garam, brenasi, pabrik es

Dapat disimpulkan bahwa terlaksananya suatu program dan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat pesisir kabupaten takalar sedikit demi sedikit sudah menggunakan fasilitas pembangunan yang ada sehingga masyarakat pesisir bisa keluar dari perangkap kemiskinan.

Hasil penelitian diatas sesuai dengan teori menurut “I Nyoman Sumaryadi “, (2005:11) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah “upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Sedangkan teori menurut “Kartasmita”,(1997) Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.

e. Jaminan Pasar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten takalar yang telah diberikan jaminan pasar itu tersedianya harga dan produksi ikan, udang yang didaratkan dipasar dan fasilitasnya berupa akses perbankan, sarana pemasaran, menyediakan informasi pasar, dana kur, kartu kusuka agar masyarakat pesisir bisa menggunakan fasilitas yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa perhatian pemerintah dari dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar kecamatan Galesong sudah diberikan bentuk jaminan pasar sehingga masyarakat pesisir mampu memberdayakan dirinya.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf e dilakukan dengan memfasilitasi akses pemasaran, sarana pemasaran, mengembangkan kerja sama kemitraan, mengembangkan sistem pemasaran dan menyediakan informasi pasar.

f. Aset Ekonomi Produktif

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aset ekonomi produktif yang telah diberikan masyarakat pesisir kabupaten takalar itu berupa rumput laut yang diberikan tak terbatas dan telah dihibahkan kapasitas 1000 ton gudang garam itu masyarakat pesisir sehingga peralatan perikanan dan penyediaan sarana usahanya sudah ada.

Dapat disimpulkan bahwa aset yang diberikan masyarakat pesisir betul sudah ada dengan memfasilitasi dan penyediaan sarana usaha. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang peran serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kementerian dan pemerintah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam pemberdayaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 huruf f dilakukan dengan memfasilitasi dan penyediaan sarana usaha sehingga masyarakat pesisir mampu meningkatkan ekonominya dan memberdayakan dirinya.

B. Faktor Penghambat Dan Pendukung Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Takalar pada Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

1. Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu sendainya tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat pesisir khususnya kabupaten takalar seperti terbatasnya ekonomi, kurang

pengetahuan tentang penggunaan alat-alat teknologi yang diberikan oleh dinas perikanan provinsi Sulawesi Selatan, Terbatasnya permodalan usaha masyarakat pesisir yang ingin membuka usaha namun masih memiliki keterbatasan dengan ekonomi, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur seperti masih adanya keterbatasan dari pemerintah pembangunan infrastruktur dan masih kurangnya bantuan sarana prasarana, keterbatasan usaha masih kurang berperan yang artinya masyarakat pesisir yang mempunyai usaha namun masih kurang dukungan dari pemerintah dan dinas perikanan.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat teori Menurut Bambang “Sunggono“, bahwa implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

A. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya iai kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan public dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan public mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan public juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana.

2. Faktor pendukung

Faktor pendukung implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir itu yaitu: Tersedianya sumberdaya alam masyarakat pesisir dimana kabupaten takalar memiliki potensi

pesisir sepanjang 74 km, potensi budidaya rumput laut, budidaya ikan, udang, dan potensi perikanan tangkap. Jumlah masyarakat pesisir yang mendiami wilayah pesisir cukup banyak ada yang bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan dan pemasaran ikan. Kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Takalar lebih diarahkan pada program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat para ahli yaitu menurut “ Budi Winarno”, (2002:102) Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut “Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun ” yang dikutip ”Solichin Abdul Wahab” Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tdk akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik. Politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kualitas yang handal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan :

1. Kebijakan pemerintah yang dilakukan dimasyarakat pesisir kabupaten takalar yaitu pemberian akses teknologi dan informasi, pembangunan infrastruktur, pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakat pesisir kabupaten takalar dan konsisten dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten takalar sehingga implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir sudah dilaksanakan dengan tepat.
2. Faktor penghambat implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir kabupaten takalar yaitu: rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat pesisir , terbatasnya permodalan usaha masyarakat pesisir, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang infrastruktur, keterbatasan usaha masih kurang berperan. faktor pendukung

Implementasi program pemberdayaan masyarakat pesisir yaitu: tersedianya sumber daya alam masyarakat pesisir, jumlah masyarakat, kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusting, (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung.
- Aziz, Moh. Ali dkk, 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodolog*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Nusantara.
- Budi Winarno. 2002:102. *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media
- Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun Dalam Solichin (2008: 71). *The top down approach*.
- Daniel Mazmanian Dan Paul Sabatier (Agustino,2012). *Implementation And Publik*.
- Edmund Husserl : *The Idea Of Phenomenology*.
- Edward III. George C. (1980). *Implementing Public Policy*.
- Ife Jim.2006. *Development : Creating Community Alternatives, Vision, Analysis & Practice*. Australia : Logman.
- Jones, (1996:166). *Policy Implementation*.
- Kartasasmita, G 1997. *Kemiskinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ketchum, (1972). *A Sea Of Trouble. Coordination Office Of the Global Programme Of Action For The Protection Of The Marine Enviromental Enviroment From Land And Based Activities*.
- Khoriddin.(1992).*Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty
- Kindervattera. 1979. *Membangun Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Yang Belajar Dan Bekerja*. Surabaya.
- Kusnadi dkk. 2001. *Pengamba 'Kaum Perempuan Fenomenal : Pelopor Dan Penggerak Perekonomian Masyarakat Nelayan*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Kusnadi. 2006 . *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara.
- Nugroho. 2014. *Public Policy, Teori, Manajemen, Dinamika Dan Kebijakan*. PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia Building Jakarta.
- Satria, 2002 : 3. *Menuju Desentralisasi kelautan*, Jakarta: Clidesindo.
- Setyadin. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori Dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : STKSPRESS.
- Suharto. Edi. 2005. *Membangun Memberdayakan Rakyat*, Bandung : Refika Aditama.
- Sukardi (Andi Prastowo, 2011: 22. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

- Sumaryadi I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Suparjan & Hempri Suyatno. 2003. *Pembangunan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Tachjan. (2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung. RTH.
- Van Meter Dan Van Horn. *The Policy Implementation Procces A Conceptual Framework*.
- Van Meter Dan Van Horn, 1975. *A Model Of The Policy Implementation*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat Pesisir.
- Wiwik, M. Farid Ma'ruf, S.Sos.,M.AP.(2011). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pantai Di Kabupaten Tuban*.
- Sefryan Ardi Saputra, Margaretha Suryaningsih, Dewi Rostyaningsih*.(2013). *Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang*.
- La Madjid (2020). *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pada Desa Waiheru Kecamatan Baguala Kota Ambon*.
- Laporan Tahunan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.2021.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.2022.Jalan Bajiminasa No.12
Website : www.dkp.sulselprov.go.id